

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hadjon, Philipus. M, Djatmanti, Tatiek Sri, Addink, G.H., dan Ten Berge, J.B.J.M. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Mustopadijaja. *Civil Society*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Pamuji, Kadar, Kartono, dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press, 2023.
- Pratiwi, Cekli Setya., Purnamawati, Shinta Ayu., dan Fauzi, Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Leip, 2016.
- Ritonga, Pandapotan. *Keuangan Negara*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Saprudin, *Model Pemerintahan; Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan, Sejarah, Konsep, dan Strategi*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Supardan, Herry. *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Malang: Media Nusa Creative, 2020.

Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.

JURNAL

Agritama, Mario dan Muh. Akbar, Ilham. (2023). “Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara,” *Sanskara Hukum dan HAM* 2(2), 1-4.

Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12(6), 2226-2236.

Ansori, Lutfil. (2017). “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Yuridis* 2(1), 10-11.

Bazarah, Jamil. Jubaidi, Ahmad. dan Hubaib, Futum. (2021). “Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 22(2), 110-111.

Edirianto, Sunardi., Sofronia, Corazon., dan Bachri, Syaiful. (2025). “Sistem Audit Laporan Keunagan,” *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 18(4), 1-2.

Falka, Abrari Rizki., Sari, Elidar., dan Yusrizal. (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan Penegak Hukum dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10(2), 342-245.

Henny Juliani. (2020). “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara,” *Administrative Law and Governance Journal* 3(1), 54-70.

Layliyah, Nafisakhatul. (2019). “Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara,” *Research Gate*, 2

Mahmud, Ade. (2018). “Problematika *Asset Recovery* dalam Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.” *Jurnal Yudisial* 11(3), 351-352.

- Manurung, Mangaraja dan Abd Rahman. (2025). "Efektivitas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Asahan," *Jurnal Serambi Hukum* 19(1),68-70.
- Mubarak, Ridho dan Trisna, Wessy.(2021). "Penentuan Kerugian Keuangan Negara akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8(2), 175-176.
- Muhajir, Ichsan. (2019). "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4(1), 4-5.
- Panjaitan, Marojahan. (2018). "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang menimbulkan Kerugian Negara menurut Hukum Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24(3), 439-443.
- Prasetyo, Yohan Dwi dan Kusetyowati, Lies, dkk. (2025). "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan Hukum Administrasi Negara di Indonesia," *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2(1), 440.
- Puspitasari, F., Mulyana, A., Arya, D. M., Lorita, D., Ashari, M. F., Jibrian, M., Hadi, N. A., Amanda, S. A., Sulyadi, Nurfadilla, S., & Wahyudi. (2025). "Analisis Asas Akuntabilitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5(2), 92–97.
- R. P. Nyoman Serikat Putra Jaya., Mulasari, Laila. (2016). "Pertanggungjawaban pidana Pejabat Penbuat Kebijakan (*Policy maker*) atas diambilnya kebijakan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Diponegoro Law Journal* 5(3), 1-2.
- Raba', R, Mieke. (2017). "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006," *Lex Crimen* 6(3), 152.
- Safriani, Andi. (2017). "Telaah terhadap asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4(1), 8.
- Setiadi, Wicipto. (2009). "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrume penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* (41), 608-613.

- Solechan, S. (2019). "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2(3), 541-557.
- Stefan, Priska Nirmala., Tinangon, Jantje J., dan Afandi, Dhullo. (2023). "Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur," *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 1(2), 110-111.
- Suhariyanto, Budi. (2018). "Penerapan pidana uang pengganti kepada korporasi dalam perkara korupsi demi pemulihan kerugian keuangan negara," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (7), 114-115.
- Suhendar dan Kartono. (2020). "Kerugian Keuangan Negara telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11(2), 238-239.
- Sulistiawan, Anggit., Ispriyarso, Budi., dan Ristyawati, Aprista. (2019). "Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(2), 149.
- Susanti, Aprilia Dwi. (2022). "Perspektif Hukum Keuangan Negara terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," *El-Dustrurie* 1(2), 54-55.
- Susanto, Sri Nur Hari. (2020). "Metode Perolehan dan Batas-batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law and Governance Journal* 3(3), 440.
- Wahyuni, A.S., H, Rahmi., R, Safrul. (2020). "Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Jaro Kabupaten Tablong," *JAPB* 2(2), 424.
- Yudistira. (2023). "Pertanggungjawaban Pejabat Negara yang melakukan Penyalahgunaan Kewenangan (menurut perspektif Hukum Administrasi Negara)," *UNES Law Review* 5(4), 4624-4625.
- Yulia, Rena, dan Widagdo, Duke Arie. (2024). "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2(1), 249.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

SKRIPSI DAN TESIS

Ray Gunawan L. Asmoh. 2019. *Analisis Yuridis Penerapan Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)*. Skripsi. Universitas Bosowa. Makassar.

Muh Aufa Aqzani. 2024. *Penerapan larangan Penyalahgunaan wewenang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Tesis. Universitas Hassanudin. Makassar.

WEBSITE

Bappenas Working Papers (2023, Maret). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. Diakses pada 9 Desember 2025.

Kepri.bpk.go.id, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara dalam Perspektif hukum*, 2019, hlm. 8-16.

Saputra, Yulianta. *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*, 2021 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

Sumut.bpk.go.id., *Tulisan hukum Tinjauan Hukum Administrasi Negara*, 10 Juni, hlm. 4-5.

Transparency International Indonesia., *Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan Sipil & Akses Pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi*, 2026 Diakses pada 29 April 2026.

PUTUSAN

Freman bin Bonto., Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024, Mahkamah Agung, 2 April 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi.